

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yogyakarta merupakan salah satu dari beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki status istimewa. Bersama-sama dengan beberapa wilayah di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, Yogyakarta berstatus istimewa berdasar UUD 1945 pasal 18 (Baskoro dan Sunaryo, 2010:3-15). Keistimewaan daerah-daerah tersebut terletak pada kepemilikan “susunan asli”, yakni bentuk pemerintahan asli sebelum daerah tersebut menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bila mendasarkan pemahaman dari pasal 18 UUD 1945, Yogyakarta memiliki susunan asli tersendiri baik itu dari susunan pemerintahan kerajaan Kraton maupun dari kerajaan Pakualaman sebelum keduanya melakukan reunifikasi pada jaman pendudukan Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan yang kini ada di Yogyakarta tidaklah baru tumbuh setelah Republik Indonesia merdeka, melainkan telah ada jauh sebelum Yogyakarta bergabung dengan RI. Bila merunut pada UUD 1945 pasal 18 tersebut, maka Yogyakarta memang sepatasnya mendapatkan status istimewa.

Selain memiliki keistimewaan dalam hal kepemilikan susunan asli pemerintahan, DIY juga merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki ciri khas khusus. Ciri khas itulah yang membuat Yogyakarta juga diberi gelar sebagai Daerah Istimewa dan membedakan dengan provinsi lainnya. Ciri khas tersebut terletak pada pemerintahannya yang dipimpin langsung oleh Sri

Sultan Hamengku Buwono sebagai gubernur dan Sri Paku Alam sebagai wakil gubernur pertama di Yogyakarta setelah menggabungkan diri dalam NKRI.

Dengan sistem pemerintahan yang demikian, tentunya membuat tradisi serta adat istiadat Jawa (khususnya Yogyakarta) masih sangat kental dipertahankan oleh seluruh masyarakat DIY. Olehnya, ketika muncul isu bahwa Sri Sultan HB tidak lagi akan menjadi gubernur Yogyakarta, masyarakat pun menjadi sangat resah. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka DPRD menyusun Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta, dimana RUU tersebut dianggap sebagai perwakilan aspirasi masyarakat yang diharapkan menjadi pendorong lahirnya Undang-Undang Keistimewaan DIY.

Komponen-komponen dalam RUUK yang telah disusun diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penggambaran keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, hal tersebut menjadi sulit tercapai karena belum adanya kesepakatan tunggal antara pemerintah pusat dan masyarakat Yogyakarta mengenai komponen-komponen yang mengisi Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY. Salah satu komponen yang masih menjadi bahan perdebatan antara pihak akar rumput dengan pembuat kebijakan adalah permasalahan mekanisme kepemimpinan di Yogyakarta.

Sebagian besar masyarakat DIY menginginkan dilakukannya penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri PA IX sebagai gubernur dan wakil gubernur di DIY, sedangkan pemerintah pusat menginginkan adanya pemilihan (pilkada) untuk memilih Gubernur dan wakil gubernur. Perbedaan pendapat ini kemudian menimbulkan berbagai pendapat dikalangan masyarakat Yogyakarta.

Halley dalam penelitiannya yang berjudul *Framing Opini Masyarakat tentang Polemik Jabatan Gubernur DIY dalam Koran Lokal DIY* memaparkan berbagai hasil jajak pendapat yang dilakukan secara independen oleh Litbang Kompas Jogja, dimana hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) pendapat yakni pro penetapan dan pro pilkada gubernur dan wakil gubernur di DIY. Dari tiga kali jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas Jogja, masyarakat yang mendukung penetapan Sultan berkisar 70-80 %. Ini menunjukkan masyarakat yang pro penetapan memang jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang pro pilkada. Namun, dengan ditemukannya pendapat masyarakat yang pro terhadap pilkada yakni sebesar 20-30 % maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat Yogyakarta mendukung penetapan, tapi juga terdapat masyarakat Yogyakarta yang pro pemilihan untuk menentukan gubernur dan wagub DIY. Setiap masyarakat DIY tentunya memiliki argumen tersendiri dalam pengungkapan dukungannya baik itu pro penetapan ataupun pro pemilihan. Hal ini akan menjadi landasan mereka dalam beropini.

Permasalahan Keistimewaan Yogyakarta tidak hanya mengundang ketertarikan masyarakat Yogyakarta saja, namun juga mengundang ketertarikan dari media massa baik cetak maupun elektronik, baik lokal maupun nasional untuk dijadikan sebagai topik pemberitaan. Hal ini disebabkan karena Yogyakarta merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan memegang peranan penting dalam kancah pemerintahan dengan sosok Sri Sultan HB X yang juga merupakan tokoh politik penting di Indonesia.

Salah satu media cetak berjenis surat kabar yang cukup gencar dalam memberitakan polemik keistimewaan Yogyakarta adalah *Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat*. Iswara (2009:6), dalam penelitiannya mengemukakan terdapat 93 pemberitaan mengenai Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY pada tahun 2007. Selain itu *KR* tidak jarang memposisikan pemberitaan seputar keistimewaan DIY sebagai *headline*. Baru-baru ini *KR* juga membuat sebuah rubrik khusus yang diterbitkan hampir setiap hari mulai dari 15 Januari sampai dengan 12 Maret 2011. Rubrik tersebut diberi nama rubrik Aspirasi Keistimewaan.

Latar belakang pembuatan rubrik Aspirasi Keistimewaan adalah untuk menampung aspirasi berupa tanggapan masyarakat Yogyakarta mengenai keistimewaan DIY, khususnya mengenai tanggapan masyarakat terhadap tata cara pemilihan pemimpin daerah yang seharusnya dilakukan di Yogyakarta. Pada rubrik tersebut, *KR* menampilkan *public figure* yang ada di Yogyakarta.

Kemunculan rubrik Aspirasi Keistimewaan di *SKH Kedaulatan Rakyat*, menunjukkan bahwa *KR* menempatkan permasalahan keistimewaan DIY sebagai berita yang bernilai tinggi yang memerlukan pemuatan khusus. Hal ini tidak terlepas dari sejarah perjalanan *KR* yang merupakan koran lokal tertua di DIY dan lahir dimasa-masa perjuangan tempo dulu. *KR* juga menjadi saksi perjalanan terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada saat itu Sultan Hamengku Buwono IX menjabat sebagai gubernur pertama DIY dan Sri Paku Alam VIII sebagai wakil gubernur DIY. Dengan demikian, peneliti menilai bahwa *KR* memiliki ikatan erat dengan historis keistimewaan DIY, terlebih karena pada

tahun 1948 Sultan HB IX selaku gubernur pernah ikut membantu terbitnya kembali *KR* tahun 1949 yakni dengan mengizinkan media tersebut menggunakan percetakan negara. Hal itulah yang juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan *KR* cenderung mengarah pada aspirasi penetapan gubernur.

Rubrik Aspirasi Keistimewaan yang berlogo Kesultanan Yogyakarta secara resmi dipublikasikan pada tanggal 15 Januari 2011 dan tidak terbit lagi pada 13 Maret 2011. Dalam jangka waktu kurang lebih dua bulan tersebut, rubrik ini terbit hampir setiap hari dan terkadang berada pada beberapa halaman berbeda seperti *Kota Yogya, Lingkar Jogja, dan DIY* (Sumber: *SKH Kedaulatan Rakyat*). Rubrik ini menampilkan 1 narasumber (*public figure* Yogyakarta) dan 1 berita pada setiap pemuatannya.

Kehadiran setiap narasumber dalam rubrik Aspirasi Keistimewaan ditentukan oleh media (*KR*) sebagai pemilik rubrik. Peneliti beranggapan bahwa narasumber yang ditampilkan dalam rubrik tersebut adalah pihak yang dianggap *KR* memiliki kualifikasi tertentu untuk memberikan opininya tentang keistimewaan DIY. Hal ini dapat terlihat dari tidak terdapatnya masyarakat awam (individu tanpa atribut) yang ditampilkan dalam rubrik. *KR* hanya menampilkan para tokoh masyarakat (*public figure*) dalam setiap terbitannya.

Sebagai seorang *public figure* dalam masyarakat, narasumber dalam rubrik Aspirasi Keistimewaan tentu memiliki opini tertentu mengenai mekanisme kepemimpinan DIY. Statusnya dalam masyarakat yang dikenal banyak memiliki massa tentu sedikit banyak mempengaruhi opini yang akan dikemukakan. Opini

yang dikemukakan bukan lagi berdasarkan atas pemahaman individu melainkan terdapat pula pertimbangan atas kelompok ataupun institusi yang dipimpin.

Pemilihan narasumber dari tokoh masyarakat ini menunjukkan kesungguhan *KR* dalam menunjukkan dukungannya kepada penetapan Sultan sebagai gubernur. Seperti yang dikemukakan oleh redaktur senior *SKH Kedaulatan Rakyat*, Ronny Sugiantoro saat wawancara kepada peneliti berikut ini: “Media punya misi apalagi *KR* adalah koran Jogja, jadi kita punya misi mengegolkan penetapan.” Dari kutipan tersebut dapat secara jelas diketahui bahwa *KR* memang memiliki misi untuk mewujudkan penetapan gubernur. Hal ini dilakukan sebagai bentuk loyalitas *KR* sebagai koran lokal DIY yang memiliki hubungan khusus dengan keistimewaan DIY.

Alasan inilah yang mengundang ketertarikan peneliti untuk mengetahui bagaimana opini yang dikemukakan oleh setiap narasumber (*public figure* Yogyakarta) tentang mekanisme kepemimpinan DIY dalam rubrik Aspirasi Keistimewaan pada *SKH Kedaulatan Rakyat* periode 15 Januari-12 Maret 2011. Apakah pengungkapan opini narasumber dalam rubrik tersebut sesuai dengan visi yang ingin di wujudkan oleh *KR* atas pendirian rubrik yakni “mengegolkan penetapan”.

Untuk meneliti opini-opini narasumber tersebut, peneliti akan menggunakan kutipan langsung yang terdapat pada setiap sampel berita untuk dijadikan indikator dalam meneliti opini *public figure* Yogyakarta dalam rubrik Aspirasi Keistimewaan. Hal ini didasarkan pada teknis penulisan yang dilakukan oleh wartawan *KR* dan bukan oleh narasumber sendiri, sehingga kutipan langsung

dianggap sebagai perwakilan langsung opini *public figure* dalam berita di rubrik Aspirasi Keistimewaan.

Pemilihan kutipan langsung sebagai data penelitian juga tidak terlepas dari kedudukan dan kekuatan kutipan langsung dalam sebuah berita, yakni menandai kebenaran dan keaslian atau kemurnian sebuah pernyataan dari narasumber (buku, hasil wawancara) sehingga keberadaan kutipan langsung juga dapat menandakan objektivitas sebuah berita.

B. Rumusan masalah

Secara umum rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah opini *public figure* Yogyakarta tentang mekanisme kepemimpinan DIY pada rubrik Aspirasi Keistimewaan *SKH Kedaulatan Rakyat* periode 15 Januari-12 Maret 2011. Dari pertanyaan di atas, peneliti kemudian menurunkan menjadi beberapa pertanyaan operasional yakni:

1. Kelompok *public figure* manakah yang paling banyak dijadikan *SKH Kedaulatan Rakyat* sebagai narasumber dalam rubrik Aspirasi keistimewaan?
2. Isi opini seperti apakah yang paling banyak disampaikan *public figure* Yogyakarta dalam menanggapi mekanisme kepemimpinan DIY?
3. Arah opini seperti apakah yang paling banyak disampaikan *public figure* Yogyakarta dalam menanggapi mekanisme kepemimpinan DIY?
4. Alasan seperti apakah yang paling banyak disampaikan *public figure* Yogyakarta dalam menyatakan dukungannya terhadap penetapan Sri Sultan HB X dan Sri PA IX sebagai gubernur dan wakil gubernur di DIY?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui opini *public figure* Yogyakarta tentang mekanisme kepemimpinan DIY pada rubrik Aspirasi Keistimewaan SKH Kedaulatan Rakyat periode 15 Januari-12 Maret 2011.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Memberikan sumbangan untuk pengembangan ilmu komunikasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama tentang penelitian pada sebuah berita yang memuat opini dari narasumber khususnya pada bagian kutipan langsungnya dengan menggunakan metode analisis isi.
- b. Sebagai media latihan untuk mempraktekkan dan mengaplikasikan teori-teori yang berhubungan dengan tema penelitian.

E. Kerangka Teori

1. Opini

Penjelasan konsep opini berikut ini lebih berfungsi untuk memaparkan makna “opini” yang tertera dalam judul penelitian sehingga memudahkan pemahaman opini seperti apa yang dimaksud dalam penelitian ini.

Nimmo dalam Zulkarimen (1989:91) mengemukakan bahwa opini adalah suatu respon yang aktif terhadap suatu stimulus, suatu respon yang dikonstruksikan melalui interpretasi pribadi. Kemudian, Cutlip dan Center dalam Sastropetro (1990:41) mendefinisikan opini atau *opinion* sebagai suatu ekspresi tentang sikap mengenai suatu masalah yang bersifat kontroversial. Opini timbul sebagai hasil pembicaraan tentang masalah yang kontroversial, yang

menimbulkan opini yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini, opini yang dimaksud adalah opini yang dikemukakan narasumber yakni *public figure* Yogyakarta dalam rubrik Aspirasi Keistimewaan tentang mekanisme kepemimpinan di DIY.

Menurut Thomson dalam Soemirat (2007:3.21), ada 3 (tiga) sebab yang menimbulkan perbedaan opini, yaitu: (1) perbedaan pandangan terhadap fakta; (2) perbedaan perkiraan tentang cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan; (3) perbedaan motif yang serupa guna mencapai tujuan.

Segala opini mencerminkan suatu organisasi yang kompleks dari tiga komponen, yakni keyakinan, nilai, dan pengharapan (Nimmo, 1989:12). Ketiga komponen ini saling lingkup satu dengan yang lainnya. Komponen-komponen tersebut antara lain:

1. Keyakinan

Menurut Nimmo, keyakinan berkaitan erat dengan kognitif atau pikiran, dari citra dan interpretasi personal. Artinya, bahwa Keyakinan mengacu pada apa yang diterima sebagai benar atau tidak benar tentang sesuatu, ia didasarkan atas pengalaman masa lalu, pengetahuan, dan informasi sekarang, dan persepsi yang berkembang. Seperti halnya dengan opini yang disampaikan oleh narasumber dalam rubrik Aspirasi Keistimewaan, komponen keyakinan ditandai dengan kognisi narasumber terhadap sikap pemerintah pusat yang menginginkan pemilihan langsung dalam menyelesaikan mekanisme kepemimpinan di DIY.

2. Nilai

Nilai adalah preferensi yang dimiliki orang terhadap tujuan tertentu atau cara tertentu melakukan sesuatu (Nimmo, 1989:13). Nilai berkaitan erat dengan afektif atau perasaan, isi dari imej pribadi yang membantu seseorang dalam mengevaluasi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Misalnya, kesukaan dan ketidaksukaan, cinta dan kebencian, hasrat dan ketakutan; bagaimana seseorang menilai sesuatu dan bagaimana intensitas penilaiannya, apakah kuat, lemah, netral. Seperti halnya dalam opini yang muncul di dalam rubrik Aspirasi Keistimewaan, komponen nilai ditandai dengan afeksi narasumber yang dituangkan dalam opini disampaikan oleh narasumber dalam rubrik Aspirasi Keistimewaan, komponen keyakinan ditandai dengan afeksi narasumber terhadap sikap pemerintah pusat yang menginginkan pemilihan langsung dalam menyelesaikan mekanisme kepemimpinan di DIY.

3. Pengharapan

Pengharapan berkaitan dengan aspek konatif, atau kecenderungan, dari citra personal dan proses interpretatif yang dapat disamakan dengan gerak hati, hasrat, kemauan, dan dorongan (Nimmo, 1989:17). Pengharapan menunjukkan akan seperti apa keadaan setelah tindakan; pengharapan dituturkan dari pertimbangan apa yang terjadi di masa lalu, keadaan sekarang, dan apa kiranya yang akan terjadi jika dilakukan perbuatan tertentu. Konsep ini bisa dipahami sebagai penilaian atau evaluasi dengan menggunakan berbagai argumentasi. Dalam hal ini komponen ekspektasi ditandai dengan keinginan atau harapan narasumber agar pemerintah pusat memahami

keinginan masyarakat Yogyakarta untuk menetapkan gubernur dan wakil gubernur di DIY.

Dari ketiga komponen di atas maka dapat disimpulkan bahwa setiap opini tidak bisa dilepaskan dari keyakinan, nilai-nilai dan pengharapan (ekspektasi) seseorang terhadap sebuah objek. Komponen keyakinan terkait dengan unsur kognitif seseorang, nilai berkaitan dengan rasa suka atau tidak suka, sedangkan pengharapan (ekspektasi) berkaitan dengan harapan seseorang terhadap suatu objek.

Selain mencerminkan suatu organisasi yang kompleks dari tiga komponen, yakni keyakinan, nilai, dan pengharapan, opini personal juga memiliki tiga karakteristik utama, antara lain:

1. Mengandung isi informasi. Opini adalah tentang sesuatu. Publikasi atau konflik yang berpotensi menjadi isu adalah isi dari sebuah opini (Nimmo, 1989:29). Dengan kata lain, opini adalah respon aktif yang bermuatan isu atau kabar angin atau apapun itu tentang suatu masalah.
2. Mempunyai arah. Sejak proses pembentukan opini dimulai, opini secara alami akan mengarah (diarahkan atau tidak) pada sebuah keputusan final atas opini tersebut.
3. Mempunyai intensitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) intensitas diartikan sebagai keadaan tentang tingkatan atau ukuran. Dalam ranah opini, intensitas dapat diartikan sebagai ukuran ketajaman terhadap isu seperti kuat, sedang dan lemah. Semakin kuat isu maka opini yang terbentuk akan semakin mengerucut pada sebuah keputusan atas isu tersebut.

Dari ketiga karakteristik yang dimiliki oleh opini maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki arah tertentu sesuai dengan isu yang dihadapi dan menunjukkan keberpihakannya.

Sebuah opini yang disampaikan dalam media massa akan memberikan pengaruh yang besar bagi pembentukan opini publik khalayaknya. Apalagi jika opini tersebut disampaikan oleh orang-orang tertentu yang juga memiliki pengaruh besar dalam masyarakat, misalnya para tokoh masyarakat (*public figure*). Opini yang disampaikan oleh seorang *public figure* akan lebih mudah mempengaruhi bahkan mampu menggiring opini publik ke arah tertentu. Hal ini karena seorang *public figure* dipahami sebagai seseorang yang telah memiliki massa yang akan mengikuti apa yang dikemukakan oleh pemimpinnya. Hal ini juga yang akan terjadi atas pemuatan rubrik Aspirasi Keistimewaan yang menampilkan narasumber dari tokoh masyarakat (*public figure*) yang sudah tentu memiliki pengikut (massa).

Dengan kekuatan atau otoritas yang dimiliki oleh seorang pelantun opini, kadangkala membuat media menggunakan orang-orang tersebut untuk tujuan tertentu. Misalnya untuk menggiring opini publik yang ada dalam masyarakat. Hal inilah yang kadangkala menimbulkan opini publik yang tidak murni dalam masyarakat.

Seperti halnya dengan opini narasumber (*public figure*) yang terdapat dalam rubrik Aspirasi Keistimewaan. *SKH Kedaulatan Rakyat* dengan sengaja membuat sebuah rubrik untuk meletakkan opini-opini *public figure* tentang keistimewaan DIY dengan tujuan agar khalayak sepenuhnya mendukung

penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Dalam proses pembuatannya opini tersebut dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berwenang dan mempunyai tujuan tertentu. Pihak yang berwenang atau berotoritas disini adalah pihak yang memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain agar bertindak sesuai dengan apa yang dikehendakinya, dalam hal ini pihak tersebut adalah *SKH Kedaulatan Rakyat*.

Seperti yang dikutip oleh Soemirat dan Yehuda dalam bukunya *Opini Publik* (2008:3.33) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kriteria pembicara opini yang dapat memberikan pengaruh atas opini yang disampaikan. Kriteria-kriteria tersebut antara lain:

1. Tahu benar tentang suatu masalah sehingga dapat menjelaskan secara mantap dan mempengaruhi orang lain
2. Pandai dan memiliki pengetahuan mendalam sehingga orang-orang menjadi percaya kepada uraiannya.
3. Memiliki suatu status resmi yang menjadikan orang itu dipandang sehingga menimbulkan kepercayaan dan pengaruh
4. Memiliki kekuatan fisik yang menyebabkan orang lain takut dan karenanya menjadi mengikuti penjelasannya dan menerimanya
5. Usianya dipandang lebih tua daripada yang lain yang ada di dalam kelompok sehingga uraiannya diperhatikan untuk menghormatinya dan kemudian menerima opininya sebagai sesuatu yang benar
6. Orang yang diketahui terkenal di dalam masyarakat sehingga orang turut menghormatinya dan mempercainya.

2. Narasumber Berita

Luwi Ishwara dalam bukunya *Catatan-catatat Jurnalisme Dasar* (2005:76), menyebutkan bahwa detak jantung dari jurnalisme terletak pada sumber berita. Hal tersebut dikemukakan sebagai penegasan bahwa sumber berita adalah sesuatu yang sangat penting dalam dunia jurnalistik. Sumber berita digunakan sebagai indikator untuk melihat kefaktualan sebuah berita yang disajikan.

Terdapat berbagai jenis sumber berita yang biasanya digunakan jurnalis untuk mengembangkan cerita dan memberikan makna yang mendalam terhadap suatu peristiwa atau keadaan. Berbagai sumber tersebut diantaranya: catatan, dokumen, referensi, buku, klipng, dan sumber berupa orang atau *human sources*. Sumber berita berupa orang inilah yang dinamakan sebagai narasumber.

Untuk memperoleh informasi dari sumber berita berupa narasumber maka perlu dilakukan wawancara. Wawancara adalah pertemuan tatap muka, yang melibatkan interaksi verbal antara dua orang atau lebih, tetapi biasanya diprakarsai untuk suatu maksud khusus dan biasanya difokuskan pada suatu masalah khusus. Dalam hal ini wawancara yang dimaksud adalah wawancara yang dilakukan penulis rubrik Aspirasi Keistimewaan dengan narasumber yang telah ditetapkan.

Pada prinsipnya semakin banyak narasumber yang digunakan untuk sebuah berita akan lebih baik sebab kemungkinan akan lebih beragam versi yang bisa dipertimbangkan untuk digunakan. Terkecuali pada berita yang sengaja dibuat untuk menampilkan satu sosok narasumber saja dalam setiap penerbitan.

Seperti yang terjadi pada rubrik Aspirasi Keistimewaan di *SKH Kedaulatan rakyat*, yang setiap terbitan rubriknya hanya menampilkan 1 (satu) narasumber dengan opininya tentang polemik keistimewaan Yogyakarta khususnya tentang mekanisme kepemimpinan di DIY.

Menurut Kusumaningrat dalam bukunya *Jurnalistik, Teori dan Praktek* (2006:250), narasumber yang paling baik adalah seseorang yang berpengetahuan dalam sesuatu bidang dan yang memiliki perasaan yang tajam yang sama dengan sang wartawan tentang perlunya publik mengetahui apa yang sedang terjadi sebenarnya. Hal lain yang penting untuk diketahui adalah bahwa setiap narasumber memiliki motif dalam memberikan informasi kepada wartawan.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat dari Kusumaningrat, Anto dan Pemianna juga menyebutkan bahwa dasar pemilihan narasumber adalah kompetensi (2007:77). Semakin terkait seseorang dalam masalah, maka semakin tepat ia disajikan sebagai narasumber. Dengan kata lain bahwa narasumber adalah tokoh yang dianggap menguasai sebuah permasalahan atau seorang pakar dalam bidang permasalahan yang akan dituliskan dalam sebuah berita.

Seperti halnya pemilihan narasumber yang dilakukan oleh *KR* dalam pada rubrik Aspirasi Keistimewaan. *KR* memiliki pertimbangan tersendiri dalam memilih narasumber untuk setiap beritanya, tidak terkecuali pada berita di rubrik Aspirasi Keistimewaan. Narasumber yang ditampilkan dalam rubrik ini adalah narasumber-narasumber yang telah melalui proses seleksi dari redaksi *KR*, sehingga pemilihannya tentu telah ditentukan berdasarkan standar kebutuhan yang diinginkan oleh *KR*.

Idealnya, dalam menentukan narasumber sebaiknya memperhitungkan beberapa hal seperti misalnya tingkat kredibilitas, keterkaitannya dengan isu yang dibahas dan kualitas dari pesan tersebut. Penentuan narasumber menjadi penting dalam upaya mendapatkan perhatian dari publik.

3. Kutipan Langsung

Salah satu hal pokok yang sebaiknya terdapat dalam sebuah berita adalah kutipan dari sumber berita dalam hal ini narasumber berita. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat seseorang dari seorang pengarang atau seseorang yang sangat terkenal, baik terdapat dalam buku, surat kabar, majalah, media elektronika, atau pun dari hasil wawancara dengan narasumber. Kutipan yang menarik dapat menambah bumbu dalam berita (Ishwara, 2005:132).

Haris Sumadiria dalam bukunya kalimat Jurnalistik (2006:57), mengemukakan bahwa kutipan langsung adalah kutipan yang berisi kalimat yang diambil langsung dari sumber pertama, baik berupa orang (misalnya diwawancarai) atau dari penulis lewat buku atau karangan yang ditulisnya. Kutipan semacam ini menuliskan kata demi kata dari apa yang dikatakan pembicara atau yang diwawancarai. Dengan kata lain kutipan langsung adalah kutipan yang mengutip pendapat orang lain secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli atau dari hasil wawancara dengan narasumber berita. Kutipan ini dibuka dan ditutup dengan tanda kutip. Deviasi kecil dan kata-kata yang eksak masih dibolehkan oleh kebanyakan surat kabar, selama artinya tidak berubah.

Dalam sebuah berita, kutipan langsung dapat menjadi salah satu indikator untuk menilai kefaktualan atau juga keobjektifan sebuah berita. Biasanya dalam penulisan berita, setiap alinea harus memuat subjek pembicara, apalagi untuk sebuah berita yang khusus berisikan pendapat seseorang untuk sebuah isu khusus seperti halnya berita pada rubrik Aspirasi Keistimewaan pada *SKH Kedaulatan Rakyat*.

Bila dalam sebuah alinea tidak ada petunjuk yang menjelaskan subjek yang mengeluarkan pernyataan, pembaca akan menarik kesimpulan bahwa pernyataan itu hanya opini penulis. Oleh karena itu, kutipan langsung yang memuat pernyataan narasumber dari hasil wawancara perlu dicantumkan sehingga akan memperkuat kepercayaan pembaca terhadap isu yang sedang dibahas karena dalam prinsipnya kutipan langsung tidak memperbolehkan penulis untuk merubah isi kutipan baik redaksinya maupun makna dari opini narasumber. Itu berarti bahwa hasil wawancara yang ditulis dalam bentuk berita (*straight news*), tidak memerlukan imajinasi penulisnya, bahkan tidak boleh memasukkan opini atau imajinasi.

F. Kerangka Konsep

Opini adalah ekspresi tentang sikap mengenai suatu masalah yang bersifat kontroversial. Opini timbul sebagai hasil pembicaraan tentang masalah yang kontroversial, yang menimbulkan opini yang berbeda-beda. Demikian halnya dengan opini yang dikemukakan oleh narasumber dalam rubrik Aspirasi Keistimewaan, dimana opini yang dikemukakan tersebut berbeda dalam isi dan arah serta alasan dalam setiap pendapatnya.

Penyampaian sebuah opini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang cukup populer adalah dengan menggunakan media massa sebagai instrumen penyampaian opini. Lazimnya media massa khususnya surat kabar biasanya menyediakan rubrik atau kolom khusus untuk menampung pendapat (opini) masyarakat. Berbeda dengan yang dilakukan surat kabar pada umumnya, selain menyediakan rubrik khusus untuk menampung opini masyarakat, *SKH Kedaulatan Rakyat* juga menyediakan rubrik khusus untuk meletakkan opini *public figure* Yogyakarta tentang mekanisme kepemimpinan DIY. *Public figure* tersebut diposisikan sebagai narasumber berita pada rubrik Aspirasi Keistimewaan.

Untuk mengetahui opini narasumber berita (*public figure* Yogyakarta) dalam penelitian ini, maka dapat dilihat dari 4 (empat) unit analisis yakni: identitas narasumber, isi opini, arah opini serta alasan penetapan dalam opini.

Detak jantung dari jurnalisme terletak pada sumber berita. Sumber berita berupa orang dinamakan narasumber. Seseorang dipilih menjadi narasumber dalam berita bukanlah tanpa alasan. Namun, terdapat kualifikasi tertentu yang harus dimiliki oleh seorang narasumber sebelum ditetapkan sebagai narasumber, misalnya seseorang tersebut harus ahli dalam bidang tertentu. Dengan kata lain, narasumber adalah tokoh yang dianggap menguasai sebuah permasalahan atau seorang pakar dalam bidang permasalahan yang akan dituliskan dalam sebuah berita. Terdapat beragam narasumber yang ditampilkan *SKH Kedaulatan Rakyat* dalam rubrik Aspirasi Keistimewaan. Narasumber yang ditampilkan tersebut merupakan narasumber yang telah dipilih berdasarkan kualifikasi tertentu yang

disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh KR. Narasumber yang ditampilkan dalam rubrik Aspirasi Keistimewaan periode 15 Januari-12 Maret 2011 dapat digolongkan ke dalam 8 (delapan) kelompok antara lain: *pejabat, pemimpin kelompok masyarakat, akademisi, pengusaha, praktisi, seniman, pengamat atau ahli serta mantan pejabat.*

Dengan mengetahui isi opini dari sampel kutipan langsung berita, maka dapat pula diketahui seberapa besar intensi narasumber (*public figure*) terhadap permasalahan mengenai mekanisme kepemimpinan di DIY baik itu opini berupa kritik, pujian, saran atau kombinasi antara kategori tersebut.

Setiap opini pasti memiliki arah dan mengarah pada konsensus mengenai sesuatu. Seperti halnya opini *public figure* dalam rubrik Aspirasi Keistimewaan. Terdapat dua arah opini dalam rubrik Aspirasi Keistimewaan yakni pro terhadap penetapan Sultan dan netral.

Penetapan Sri Sultan HB X dan Sri PA IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY merupakan mekanisme yang dipilih oleh sebagian besar narasumber dalam Aspirasi Keistimewaan. Terdapat tujuh (7) alasan penetapan dikemukakan oleh narasumber dalam rubrik Aspirasi Keistimewaan. Berbagai alasan tersebut antara lain : (1) *penetapan merupakan inti dari keistimewaan DIY,* (1) *unsur kesejarahan,* (3) *unsur yuridis,* (4) *cerminan demokrasi Pancasila,* (5) *jaminan situasi kondusif, aman dan tentram,* (6) *figur atau personal Sri Sultan HB X,* serta (7) *mendorong peningkatan perekonomian daerah* (8) *lain-lain.*

Oleh karena opini yang dikemukakan oleh narasumber dalam rubrik Aspirasi Keistimewaan dituliskan oleh wartawan dalam bentuk berita dalam

pemuatannya, maka secara keseluruhan opini tersebut telah mendapat campuran baik dari wartawan ataupun dari media tempat diterbitkan. Terkecuali opini yang ditempatkan pada kutipan langsung. Hal ini dikarenakan kutipan langsung adalah kutipan yang mengutip pendapat orang lain secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli atau dari hasil wawancara dengan narasumber berita. Dalam penulisan kutipan langsung, penulis tidak diperbolehkan mengubah isi kutipan baik redaksinya maupun makna dari opini narasumber. Dengan pertimbangan tersebut, peneliti akan menggunakan kutipan langsung sebagai indikator untuk meneliti opini narasumber (*public figure* Yogyakarta) dalam rubrik Aspirasi Keistimewaan.

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana opini *public figure* yang terdapat dalam rubrik Aspirasi Keistimewaan dalam menanggapi mekanisme kepemimpinan DIY. Untuk meneliti hal tersebut, peneliti menggunakan identitas narasumber, isi opini, arah opini serta alasan penetapan yang dikemukakan narasumber sebagai unit analisis penelitian. Selanjutnya, peneliti telah menyusun unit analisis tersebut ke dalam beberapa kategori dengan batasan-batasan, antara lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 1
Unit Analisis dan Kategorisasi Penelitian

Unit Analisis	Kategorisasi
Identitas Narasumber (<i>public figure</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat 2. Pemimpin kelompok masyarakat 3. Akademisi 4. Pengusaha 5. Praktisi 6. Seniman 7. Pengamat atau ahli 8. Mantan Pejabat

Isi Opini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kritik 2. Pujian 3. Saran 4. Kombinasi kritik dan pujian 5. Kombinasi kritik dan saran 6. Kombinasi pujian dan saran 7. Kombinasi kritik, pujian dan saran
Arah Opini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pro penetapan 2. Netral
Alasan penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inti keistimewaan DIY 2. Alasan kesejarahan 3. Cerminan demokrasi Pancasila 4. Situasi kondusif, aman dan tentram telah terjamin 5. Figur atau personal Sri Sultan HB X 6. Mendorong peningkatan perekonomian daerah 7. Lain-lain

Sumber: Kerangka Konsep

G. Definisi Operasional

Unit analisis dan kategorisasi di atas merupakan acuan dalam melakukan penelitian ini. Diharapkan bahwa unit analisis dan kategorisasi dapat diaplikasikan sebagai pedoman penelitian untuk melihat opini *public figure* Yogyakarta tentang keistimewaan DIY pada rubrik Aspirasi Keistimewaan pada *SKH Kedaulatan Rakyat* periode 15 Januari -12 Maret 2011. Berikut ini adalah penjabaran tiap-tiap unit analisis dan kategorisasi yang digunakan dalam penelitian ini.

Unit analisis identitas narasumber (*public figure*):

Identitas *public figure* dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pejabat. Pejabat adalah pegawai pemerintah yg memegang jabatan penting (unsur pimpinan).

2. **Pemimpin Kelompok Masyarakat.** Pemimpin Kelompok Masyarakat adalah pemimpin kumpulan masyarakat yang merupakan kesatuan beridentitas dengan sistem norma yang mengatur pola-pola interaksi antar manusia itu.
3. **Akademisi.** Akademisi adalah orang yang berpendidikan tinggi.
4. **Pengusaha.** Pengusaha adalah orang yang berusaha dalam bidang perdagangan.
5. **Praktisi.** Praktisi dapat diartikan sebagai pelaksana. Contoh: Praktisi hukum.
6. **Seniman.** Seniman adalah orang yang mempunyai bakat seni dan berhasil menciptakan dan menggelarkan karya seni.
7. **Pengamat atau ahli.** Pengamat atau ahli adalah orang yang mengambil atau mengawasi. Orang yang paham tentang sesuatu.
8. **Mantan Pejabat.** Mantan pejabat adalah bekas pemangku jabatan.

(Sumber: <http://kamusbahasaindonesia.org/>)

Unit analisis isi opini :

Isi merupakan kriteria pertama dari opini publik. Opini adalah tentang sesuatu, maka kejelasan isi opini menandakan opini tersebut dapat disebut sebagai sebuah opini. Dalam penelitian ini, isi opini dibagi menjadi 7 (tujuh) kategori yakni:

- a. **Kritik.** Kritik adalah kecaman atau tanggapan. Kritik yang dimaksud dalam karegori ini adalah kritik narasumber (*public figure* Yogyakarta) terhadap pemerintah yang menginginkan dilakukannya pemilihan untuk menyelesaikan pemasalahan kepemimpinan DIY serta kritik yang ditujukan

kepada pihak yang kontra terhadap penetapan Sri Sultan HB X dan Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Contoh isi opini dalam sampel kutipan langsung berupa kritik misalnya seperti, *“Keliru kalau menganggap kekuasaan Kraton Yogyakarta itu feodal, sejak HB IX hubungan Kraton dan rakyatnya adalah hubungan dekat yang biasa. Ketika Sultan lewat di jalan, tidak ada penghormatan yang berlebihan dari masyarakat, semua berjalan wajar. Itu menunjukkan Kraton Yogyakarta tidak feodal”* yang dimuat pada tanggal 5 Februari 2011, dengan narasumber Joko Wintolo, Peneliti di *Institute of Public Policy and Economic Studies (Inspect)*.

- b. Pujian. Pujian adalah pernyataan memuji. Contoh isi opini dalam sampel kutipan langsung berupa pujian terhadap kinerja Sri Sultan HB X sebagai pemimpin dan gubernur di DIY, misalnya seperti, *“Saya kira dalam persoalan ini tidak hanya sekedar berbicara demokratis atau tidak. Apalagi jasa Sri Sultan HB sebagai raja di Kraton terhadap keberadaan NKRI sangat hebat dan tidak bisa ditiru oleh daerah lain. Untuk itu, penetapan sampai saat ini menjadi pilihan tepat yang tidak bisa ditawarkan lagi”* yang dimuat pada tanggal 18 Januari 2011, dengan narasumber Prof Dr Djohar MS, Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST).
- c. Saran, himbauan, usulan, dan atau harapan. Saran adalah pendapat (usul, anjuran, cita-cita) yg dikemukakan untuk dipertimbangkan. Contoh isi opini dalam sampel kutipan langsung berupa saran terhadap mekanisme yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan kepemimpinan

DIY misalnya seperti, *“Keistimewaan DIY pada dasarnya jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang melekat pada Sri Sultan HB X dan Paku Alam IX. Bila poin itu tidak masuk dalam draf, semua tidak ada artinya”* yang dimuat pada tanggal 16 Januari 2011, dengan narasumber Prof Dr Wuryadi, Ketua Keluarga Besar Marhaenis (KBM).

- d. Kombinasi kritik dan pujian. Contoh isi opini dalam sampel kutipan langsung berupa kombinasi kritik dan pujian dinyatakan seperti dalam sampel kutipan langsung seperti, *“Keberadaan raja di Yogya, termasuk Kraton Yogya itu menjadi daya tarik yang luar biasa. Bahkan wisman juga tertarik dengan sejarah Yogyakarta, dari masa kerajaan hingga bergabung dengan NKRI. Kalau pemerintah memaksakan pemilihan, yang terjadi justru bisa mengurangi nilai sejarah Yogyakarta sendir”* yang dimuat pada tanggal tanggal 25 Februari 2011 dengan narasumber Edwin Himna, Ketua Association of the Indonesia Tours And Travel (Asita).
- e. Kombinasi kritik dan saran. Contoh isi opini dalam sampel kutipan langsung rubrik Aspirasi Keistimewaan berupa kombinasi kritik dan saran dinyatakan seperti, *“Demokasi berdasarkan pancasila adalah musyawarah mufakat maka kalau perwakilan rakyat sudah menghendaki penetapan, saya kira pemerintah pusat tinggal melakukan musyawarah. Rakyat sudah merasakan model pemerintahan yang baik maka tidak sepatutnya diubah dengan sesuatu yang belum jelas kebaikannya. Tidak boleh nasib rakyat dipertaruhkan untuk sesuatu yang belum tentu jelas baik buruknya”* yang

dimuat pada tanggal 5 Februari 2011 dengan narasumber Mohammad Jazir ASP, Ketua Takmir Masjid Jogokariyan.

- f. Kombinasi pujian dan saran. Contoh isi opini dalam sampel kutipan langsung berupa kombinasi kritik dan pujian dinyatakan seperti dalam sampel kutipan langsung seperti, *“Dalam penentuan jabatan, Kraton selalu menggunakan kriteria tertentu jadi tidak sekedar menunjuk. Karena sosok seorang Sultan tidak sekedar menjadi gubernur, tetapi juga harus bisa menjadi pengayom masyarakat. Saya kira baik Sri Sultan Hamengku Buwono IX maupun X sudah melaksanakan tahta untuk rakyat itu dengan baik. Saya kira sudah saatnya pemerintah pusat memberikan kepercayaan pada masyarakat DIY untuk menentukan model dalam pemilihan gubernur bagi daerahnya sendiri. Oleh karena itu, apabila sebagian besar masyarakatnya menghendaki adanya penetapan karena dinilai lebih efektif, tidak ada salahnya jika aspirasi tersebut diakomodir.”* yang dimuat pada tanggal 9 Februari 2011 dengan narasumber Rudiarto, Ketua Paguyuban Tridarma.
- g. Kombinasi kritik, pujian dan saran. Contoh isi opini dalam sampel kutipan langsung berupa kombinasi kritik, pujian dan saran dinyatakan seperti dalam sampel kutipan langsung seperti, *“Kalau berpegang pada Pancasila mestinya yang dijunjung tinggi adalah musyawarah mufakat. Saya kira rakyat DIY tidak akan mudah diadu domba, karena mereka tidak hanya kritis tapi juga cerdas dalam menyikapi sesuatu hal. Walaupun begitu akan lebih baik jika aspirasi masyarakat DIY tetap dipertimbangkan”* yang

dimuat pada tanggal 22 Februari 2011 dengan narasumber Djoko Santoso, Pensiunan Pejabat Bakin ata BIN.

Unit analisis arah opini :

Opini mempunyai arah. Sejak proses pembentukan opini dimulai, opini secara alami akan mengarah (diarahkan atau tidak) pada sebuah keputusan final atas opini tersebut. Arah tersebut dapat berupa setuju, tidak setuju, ataupun ragu-ragu terhadap sesuatu objek. Arah opini dalam penelitian ini dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pro Penetapan. Kategorisasi ini menjelaskan arah opini yang berpandangan bahwa penetapan Sri Sultan HB X dan Sri PA IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah hal yang semestinya dilakukan, dimana narasumber berita yang juga merupakan masyarakat DIY mendukung hal tersebut.
- b. Netral. Kategorisasi ini menjelaskan arah opini yang berpandangan bahwa penetapan atau pemilihan gubernur bukanlah menjadi hal utama dari keistimewaan Yogyakarta sehingga tidak menjadi hal yang perlu diperdebatkan.

Unit analisis alasan penetapan :

Thomson dalam Soemirat (2007:3.21) menjelaskan bahwa orang-orang yang mempunyai opini yang tegas, biasanya mendasarkan opininya pada alasan-alasan yang rasional (*rational grounds*). Alasan-alasan yang rasional berarti dasar-dasar yang masuk akal dan dapat dimengerti orang lain. Alasan penetapan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai berikut:

1. Merupakan inti keistimewaan DIY. Kategori ini dimaknai bahwa menetapkan Sri Sultan HB X dan Sri PA IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah merupakan cara yang harus ditempuh untuk menjamin keistimewaan DIY, mengingat jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan kesepakatan Sultan terdahulu dengan Presiden Soekarno.
2. Unsur Kesejarahan. Kategori ini dimaknai bahwa menetapkan Sri Sultan HB X dan Sri PA IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah cara yang harus ditempuh untuk menghormati sejarah perjalanan keistimewaan DIY baik ditinjau dari landasan hukum ataupun dari sejarah perjalanan NKRI.
3. Cerminan demokrasi Pancasila. Kategori ini dimaknai bahwa menetapkan Sri Sultan HB X dan Sri PA IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah cara yang harus ditempuh untuk mengamalkan nilai-nilai dalam demokrasi Pancasila misalnya musyawarah mufakat. Hal ini ditunjukkan dengan kesepakatan bersama dari masyarakat DIY.
4. Jaminan situasi kondusif, aman dan tentram. Kategori ini dimaknai bahwa menetapkan Sri Sultan HB X dan Sri PA IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah cara yang harus ditempuh untuk tetap mempertahankan situasi yang tenang, aman, dan tentram di DIY yang selama ini telah dirasakan oleh masyarakat baik pendatang maupun masyarakat asli DIY sejak kepemimpinan Sri Sultan HB X dan Sri PA IX.

5. Figur atau personal Sri Sultan HB X. Kategori ini dimaknai bahwa sosok HB X dan Sri PA IX memiliki pengaruh yang kuat di dalam kehidupan masyarakat kota Yogyakarta.
6. Mendorong peningkatan perekonomian daerah. Kategori ini dimaknai bahwa menetapkan Sri Sultan HB X dan Sri PA IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah cara yang harus ditempuh untuk meningkatkan perekonomian DIY. Peningkatan perekonomian tersebut dapat terlihat dari sektor pariwisata ataupun dari sektor budaya dan pendidikan.
7. Lain-lain. Kategori ini dipakai untuk mewakili alasan-alasan penetapan lainnya yang dikemukakan oleh narasumber yang tidak tercakup dalam kesembilanxc alasan diatas.

H. Metodologi Penelitian

H.1 Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode analisis isi. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Penelitian ini lebih mementingkan keluasan data sehingga data atau hasil penelitian dianggap merupakan representasi dari seluruh populasi (Kriyantono, 2007:57). Penelitian ini bersifat objektif dan menggunakan uji statistik untuk menganalisis data. Objektif artinya, hasil analisis tergantung pada prosedur riset. Kategori yang sama bila digunakan untuk isi dan prosedur yang sama, maka hasilnya juga harus sama, meski menggunakan riset yang berbeda.

Peneliti menggunakan metode analisis isi, yakni hanya menganalisis isi yang nampak, bukan makna yang dirasakan oleh peneliti (Kriyantono, 2007:228). Menurut Berelson dan Kerlinger dalam *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (2007: 228), analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak.

Penggunaan analisis isi mempunyai beberapa manfaat dan tujuan. Seperti yang dikutip Kriyantono dari buku *Mass Communication Theory* karya McQuail, yaitu beberapa tujuan dilakukannya analisis terhadap isi pesan komunikasi diantaranya ialah untuk mengetahui refleksi dari nilai-nilai sosial dan budaya serta sistem kepercayaan masyarakat dalam isi media (teks media). Dengan kata lain bahwa tujuan utama dilakukannya analisis isi adalah untuk mendeskripsikan pesan berupa nilai sosial dan budaya serta sistem kepercayaan masyarakat dalam ranah publik dengan perantaraan teks. Atau dengan kata lain, analisis isi digunakan untuk menganalisis pesan dan bagaimana pesan tersebut disampaikan, olehnya analisis isi hanya dapat menjawab apa ciri pesan yang tertulis dan bagaimana pesan tersebut disampaikan. Dalam penelitian ini media analisis adalah kutipan langsung dari berita dalam rubrik Aspirasi Keistimewaan pada *SKH Kedaulatan Rakyat*.

Penelitian ini bersifat deskriptif terutama untuk mendeskripsikan opini narasumber yang terdapat dalam kutipan langsung rubrik Aspirasi Keistimewaan dalam menanggapi mekanisme kepemimpinan DIY pada *SKH Kedaulatan Rakyat* periode 15 Januari 2011-12 Maret 2011.

H.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah berita dalam rubrik Aspirasi Keistimewaan di *SKH Kedaulatan Rakyat* periode 15 Januari 2011-12 Maret 2011. Oleh karena opini yang dikemukakan oleh narasumber dalam rubrik Aspirasi Keistimewaan dituliskan oleh wartawan dalam bentuk berita dalam pemuatannya, maka secara keseluruhan opini tersebut telah mendapat campuran baik dari wartawan ataupun dari media tempat diterbitkan. Terkecuali opini yang ditempatkan pada kutipan langsung. Hal ini dikarenakan kutipan langsung adalah kutipan yang mengutip pendapat orang lain secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli atau dari hasil wawancara dengan narasumber berita. Dalam penulisan kutipan langsung, penulis tidak diperbolehkan mengubah isi kutipan baik redaksinya maupun makna dari opini narasumber. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan kutipan langsung sebagai indikator untuk meneliti opini narasumber (*public figur* Yogyakarta) dalam rubrik Aspirasi Keistimewaan.

Pemilihan *KR* ini didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain pertimbangan akademik keilmuan, pertimbangan praktis serta disengaja. Pertimbangan akademik maksudnya bahwa objek yang diangkat dalam penelitian ini sesuai dengan bidang keilmuan yang peneliti tekuni, yaitu bidang jurnalistik. Sedangkan, pertimbangan praktis maksudnya mudah diperoleh (salah satu surat kabar lokal dimana peneliti berdomisili), dan disengaja maksudnya dipilih karena faktor-faktor tertentu, yaitu dikarenakan *KR* merupakan satu-satunya koran lokal yang memberikan ruang khusus berupa rubrik yang berisi berita tentang opini

narasumber (*public figure* Yogyakarta) dalam membahas mekanisme kepemimpinan di DIY. Selain itu, *SKH Kedaulatan Rakyat* adalah salah satu dari berbagai koran lokal di Yogyakarta yang gencar dalam memberitakan tentang Keistimewaan Yogyakarta dari awal terjadinya polemik hingga saat ini.

Sedangkan, pemilihan *time frame* dalam penelitian ini yakni 15 Januari-12 Maret 2011 didasarkan pada jumlah seluruh penerbitan rubrik Aspirasi Keistimewaan, yakni pada 15 Januari 2011 sampai 12 Maret 2011 oleh *Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat*. Tercatat 50 berita sejak hari pertama rubrik tersebut dimuat di *KR* yakni 15 Januari 2011 hingga penerbitan terakhir yakni pada 12 Maret 2011.

H.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek dan fenomena yang diteliti (Kriyantono, 2007:149). Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan berita dalam rubrik Aspirasi Keistimewaan selama kurun waktu 15 Januari 2011-12 Maret 2011. Jika dihitung dengan perkalian jumlah kemunculan rubrik Aspirasi Keistimewaan setiap bulan (tidak termasuk pada Hari Libur Nasional) maka populasi yang didapat adalah sebagai berikut:

TABEL 2
Populasi Penelitian

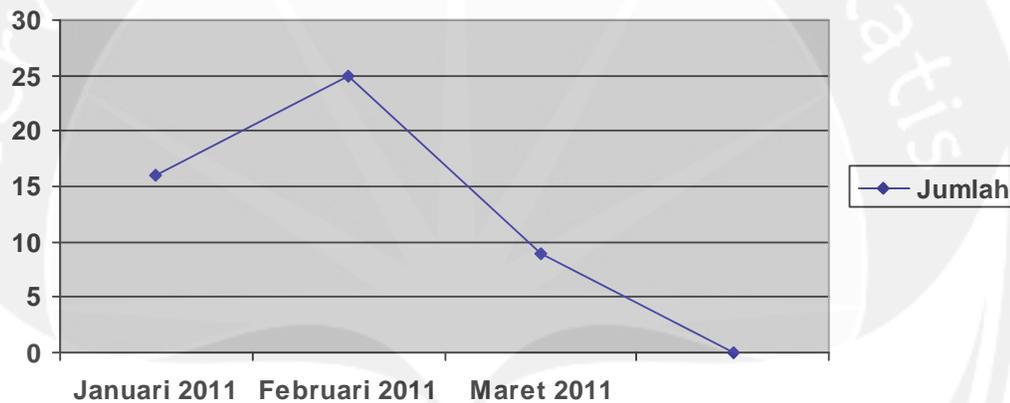
Bulan Penelitian	Jumlah berita dalam bulan tersebut
Januari 2011	16 berita (tidak dimuat tanggal 17)
Februari 2011	25 berita (tidak dimuat tanggal 13, tanggal 3 dan 15 Hari Libur Nasional sehingga koran tidak terbit)
Maret 2011	9 berita (tidak dimuat tanggal 1 dan tanggal 4, tanggal 5 Hari Libur)

	Nasional sehingga koran tidak terbit)
Total Populasi	50 berita

Sumber: SKH Kedaulatan Rakyat

Jika digambarkan dalam grafik maka kemunculan rubrik Aspirasi Keistimewaan dalam tiga bulan penerbitan (Januari, Februari, Maret) tahun 2011 adalah sebagai berikut:

GRAFIK 1
Jumlah Kemunculan Populasi Penelitian



Rubrik Aspirasi Keistimewaan setiap harinya hanya memuat 1 (satu) berita dengan narasumber yang berbeda-beda. Jumlah maksimal yang ada adalah 25 berita yakni pada bulan Februari 2011. Dari 28 hari yang terdapat dalam bulan Februari tersebut, KR tidak menerbitkan rubrik Aspirasi Keistimewaan sebanyak 3 kali yakni pada tanggal 3 dan 5 (bertepatan Hari Libur Nasional), dan pada tanggal 13 tidak dimuat karena alasan tertentu.

Jumlah minimal berita adalah 9, yakni pada bulan Maret 2011. Salah satu penyebabnya ialah karena rubrik tersebut sudah tidak diterbitkan lagi sejak 13 Maret 2011, atau dengan kata lain 12 Maret 2011 adalah hari terakhir rubrik

Aspirasi Keistimewaan diterbitkan oleh *KR*. Dimana dalam jangka waktu antara tanggal 1-12 Maret 2011, *KR* sebanyak 3 (tiga) kali tidak memuat rubrik ini yakni tanggal 1 dan tanggal 4 dikarenakan alasan tertentu, dan pada tanggal 5 Maret bertepatan dengan Hari Libur Nasional, sehingga total berita yang dapat dikumpulkan pada bulan Maret 2011 hanya berjumlah 9 berita.

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek atau fenomena yang akan diteliti (Kriyantono, 2007:149). Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan rancangan sampling nonprobabilitas, yakni dengan teknik sampling purposif (*purposive sampling*). Sampel yang akan dipilih dalam teknik ini hanyalah sampel-sampel yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian (Kriyantono, 2007:154). Sedangkan populasi yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut tidak dijadikan sampel. Jika *time frame* dalam penelitian adalah 15 Januari 2011-12 Maret 2011 (yang menjadi populasi dalam penelitian) maka setiap berita yang dihasilkan dalam jangka waktu tersebut tidak mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel penelitian ini. Dengan populasi yang berjumlah 50 artikel, peneliti hanya akan mengambil sejumlah berita yang memenuhi kriteria tertentu untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Alasan dipilihnya teknik sampling purposif adalah terkait tujuan dalam penelitian yakni untuk meneliti opini dari narasumber mengenai mekanisme kepemimpinan di DIY. Dimana, opini yang dimaksud peneliti dibatasi pada opini yang dituliskan wartawan dalam kutipan langsung.

Dengan teknik pengambilan sampling tersebut maka sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini diambil sesuai dengan tema dan tujuan penelitian yaitu untuk meneliti bagaimana opini *public figure* Yogyakarta dalam menanggapi mekanisme kepemimpinan di DIY. Dari teknik pengambilan sampling tersebut maka dari 50 berita ditemukan sampel sebanyak 44 berita. Kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel yakni yang membahas tentang mekanisme kepemimpinan DIY dan memiliki kutipan langsung dari tokoh masyarakat yang menjadi narasumber beritanya. Berikut judul berita yang didalamnya terdapat kutipan langsung tentang mekanisme kepemimpinan DIY:

TABEL 3
Judul Artikel yang Akan Diteliti

No.	Tanggal	Judul Artikel Berita di Rubrik Aspirasi Keistimewaan
1.	15 Januari	Keistimewaan Tanpa Penetapan, Semu
2.	16 Januari	Penetapan, Cermin Demokrasi Pancasila
3.	18 Januari	Penetapan DIY Tidak Bisa Ditawar
4.	20 Januari	Suara Masyarakat Harus Diapresiasi
5.	21 Januari	Kraton dan Masyarakat Sudah Menyatu
6.	23 Januari	Rakyat Membela Mati-Matian
7.	24 Januari	Efektifnya Implementasi Kebijakan Publik
8.	25 Januari	Pemilihan Langsung Terlalu Mahal
9.	26 Januari	Warisan Sejarah Harus Dipelihara
10.	27 Januari	Pemilihan Belum Tentu Lebih Baik
11.	28 Januari	Keistimewaan Sebaiknya Dirembuk
12.	30 Januari	Kondisi Tenang Jangan 'Diutak-atik'
13.	31 Januari	Demokrasi Tak Harus 'Seragam'
14.	01 Februari	Yogya Asuh Bayi NKRI
15.	02 Februari	Demokrasi Yogya Tonjolkan Loyalitas
16.	04 Februari	Kraton Menjadikan Warga Tionghoa Nyaman
17.	05 Februari	Penetapan Sesuai Kehendak Rakyat
18.	06 Februari	Penetapan Sudah Kesepakatan Rakyat DIY
19.	07 Februari	Demokrasi di DIY Simbol Kearifan
20.	09 Februari	Serahkan Warga DIY untuk Menentukan
21.	10 Februari	Demokrasi Tak Harus Pemelihan
22.	11 Februari	Yogya Jangan 'Diotak-atik'

23.	12 Februari	Pemilihan Tak Menjamin Hasilnya Baik
24.	14 Februari	Keistimewaan Yogya, Sejarah Panjang
25.	16 Februari	Musyawarah Juga Demokrasi
26.	17 Februari	Jangan Lucuti Keistimewaan Yogya
27.	18 Februari	Energi Tak Kenal Lelah
28.	19 Februari	Percobaan Risakan untuk NKRI
29.	21 Februari	Pemilihan Langsung Belum Tentu Lebih Baik
30.	22 Februari	Ikuti Keinginan Masyarakat DIY
31.	23 Februari	Penetapan, Demokrasi Paling 'Halus'
32.	24 Februari	Citra Istimewa setelah Penetapan
33.	25 Februari	Pemilihan Bisa Kurangi Nilai Sejarah
34.	26 Februari	Penetapan, Demokrasi Rakyat Yogya
35.	27 Februari	Pemerintah Pusat Ngotot, Bisa Merepotkan
36.	28 Februari	Kraton Dukung Iklim Usaha Kondusif
37.	02 Maret	Dengar Suara Rakyat Yogya
38.	03 Maret	Gelisah Kalau Belum Penetapan
39.	06 Maret	Penetapan, Yogya Kondusif
40.	07 Maret	Demokrasi Kedepankan Musyawarah Mufakat
41.	08 Maret	Jangan Lupakan SG-PAG
42.	09 Maret	Kepastian Penetapan, Ditunggu Pengusaha
43.	11 Maret	Keistimewaan Ada Argumennya
44.	12 Maret	Demokrasi Tak Harus Pemilihan

Sumber: SKH Kedaulatan Rakyat

H.4 Data Penelitian

Data dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti di lapangan. Dalam penelitian ini, data yang dimaksud peneliti adalah dokumentasi sampel berita rubrik Aspirasi Keistimewaan dalam *SKH Kedaulatan Rakyat* periode 15 Januari-12 Maret 2011. Selain itu, peneliti juga memasukkan hasil wawancara terhadap redaksi *KR* sebagai data tambahan untuk melengkapi data yang dibutuhkan.

H.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Maksimal atau tidaknya hasil dari sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh teknik dan alat pengumpulan data. Teknik pengumpulan data

dalam penelitian ini adalah observasi tidak langsung (*indirect observation*) di mana peneliti akan meneliti produk komunikasi, dalam hal ini teks berita (Frey, 1991: 144).

Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti bagaimana opini narasumber (*public figure* Yogyakarta) tentang mekanisme kepemimpinan di DIY pada *SKH Kedaulatan Rakyat* periode Januari 2011-Maret 2011.

a. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen tertulis (data primer) berupa sampel rubrik Aspirasi Keistimewaan dalam *SKH Kedaulatan Rakyat* periode 15 Januari -12 Maret 2011. Berdasarkan beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti, maka dari keseluruhan populasi yang ditentukan, peneliti hanya mengambil 44 berita untuk dijadikan sampel penelitian.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur, baik buku, jurnal, koran, karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus dan variabel penelitian.

c. Wawancara

Wawancara perlu dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi langsung dari *SKH Kedaulatan Rakyat* mengenai data-data terkait subjek dan objek penelitian.

H.6 Pengkodingan

Pengkodingan dalam melakukan analisis dan pengukuran terhadap opini narasumber (publik) dalam menanggapi mekanisme kepemimpinan DIY akan dilakukan dengan memilih 2 (dua) orang yang dianggap memiliki kemampuan dalam memahami topik penelitian serta memiliki latar belakang pendidikan Ilmu Komunikasi dan telah menagmbil mata kuliah *Analisis Isi dan Framing*. Dari kriteria tersebut maka peneliti memilih Jimmy Fernanda dan Hendy Aditya sebagai pengkoder dalam penelitian ini. Kegiatan pengkodingan dimulai dengan memberikan penjelasan mengenai batasan dan definisi unit analisis. Pengkoder dalam penelitian ini ialah mahasiswa angkatan 2005 Universitas Atma Jaya Yogyakarta, konsentrasi studi Jurnalistik.

H.7 Uji Reliabilitas

Melakukan uji reliabilitas sangat penting dalam penelitian kuantitatif. Tujuannya adalah agar penelitian ini mencapai hasil yang objektif dan reliabel. Kategorisasi dalam analisis isi merupakan instrumen pengumpul data. Fungsinya identik dengan kuisisioner dalam survei. Supaya objektif, maka kategorisasi harus dijaga reliabilitasnya. Terutama untuk kategorisasi yang dibuat sendiri oleh periset sehingga belum memiliki standar yang teruji, maka sebaiknya dilakukan uji reliabilitas sebelum data diolah. Salah satu uji reliabilitas yang dapat digunakan adalah rumus Ole R. Holsty (Kriyantono, 2007:234).

Uji reliabilitas memunculkan indeks yang menunjukkan sejauh mana pengukur (kategori) dapat dipercaya atau diandalkan. Prinsip dari uji reliabilitas adalah semakin tinggi persamaan hasil pengkodingan di antara dua pengkoding

maka semakin reliabilitas kategori yang telah disusun. Derajat kesamaan dinilai memenuhi syarat kepercayaan apabila hasilnya diatas 0,6 atau 60%.

Untuk melihat apakah data yang digunakan dalam analisis ini dapat memenuhi harapan, maka dipakai metode uji reliabilitas berdasarkan rumus Ole R. Holsty. Peneliti akan melakukan *pretest* dengan cara mengkoding sampel ke dalam kategorisasi. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh peneliti tapi juga dilakukan oleh seseorang yang lain yang ditunjuk peneliti sebagai pengkoding atau *intercoder*. Kemudian hasil pengkodingan dibandingkan dengan menggunakan rumus Holsty, dengan menggunakan data nominal dalam bentuk presentase pada tingkat persamaan atas kategori yang digunakan, yaitu:

$$\text{Reliability (CR)} = \frac{2M}{N1+N2}$$

M = Jumlah pernyataan yang disetujui oleh pengkoding (hakim) dan peneliti

N1,N2 = Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkoding (hakim) dan peneliti

Data hasil penelitian akan diolah secara kuantitatif dengan cara mencatat frekuensi kemunculan unit analisis yang telah ditetapkan melalui lembar koding, kemudian disusun ke dalam tabel untuk mempermudah penelitian.

H.8 Teknik Analisis Data

Setelah melakukan *pretest* pengkodingan sampel kutipan langsung dan diuji reliabilitasnya, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan

distribusi frekuensi dan tabulasi silang. Teknik analisis data dipaparkan sebagai berikut:

a. Distribusi Frekuensi

Analisis data dilakukan dengan menggunakan distribusi frekuensi, yaitu dengan mengklasifikasikan data pada masing-masing kategori, serta dimasukkan ke dalam lembar koding untuk dijumlahkan dan dipersentase menggunakan distribusi frekuensi berdasarkan kategori jenis tema yang ada. Distribusi frekuensi merupakan tabel ringkasan data yang menunjukkan frekuensi atau banyaknya item pada setiap kelas yang ada. Selanjutnya, hasil olahan kemudian dianalisis dengan melakukan perbandingan antara data dengan dasar teori yang dijadikan acuan dalam penelitian. Dari setiap tabel, diberikan penjelasan dalam bentuk uraian yang disusun sistematis.

b. Tabulasi Silang

Analisis data dengan tabulasi silang adalah sebuah teknik statistik yang menjelaskan dua atau lebih variabel secara bersamaan dan hasil dalam tabel tersebut mencerminkan distribusi gabungan dua atau lebih variabel yang mempunyai kategori terbatas atas nilai yang berbeda. Tabulasi silang adalah penggabungan distribusi frekuensi dari dua atau lebih variabel dalam sebuah tabel.

Tabulasi silang menghasilkan tabel-tabel yang mencerminkan distribusi gabungan dua atau lebih variabel dengan jumlah kategori atau nilai pembeda yang terbatas. Tabel tabulasi silang juga disebut tabel kontingensi. Data tersebut dianggap data kualitatif atau data kategori karena masing-masing variabel diasumsikan hanya mempunyai sebuah skala nominal. Tabulasi adalah bagian

terakhir dari pengolahan data. Setelah data diolah kemudian data tersebut akan dianalisis.

Analisis data dengan tabulasi silang digunakan peneliti dalam penelitian ini untuk lebih memperdalam dan memperjelas hasil temuan yang peneliti dapatkan. Misalkan untuk unit analisis isi opini dengan sub unit analisis opini dalam bentuk saran, dari temuan yang sudah peneliti dapatkan melalui teknik analisis data distribusi frekuensi, peneliti ingin mengetahui data pendukung informasi seperti opini yang berupa kritik baik terhadap pemerintah pusat maupun terhadap masyarakat yang kontra penetapan paling banyak disampaikan oleh narasumber dengan identitas sosial sebagai apa dalam masyarakat.

H.9 Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kantor Redaksi *Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat*, Jalan. P. Mangkubumi 40-42, Yogyakarta 55232